



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 28 Agustus 2014

Halaman: 20

Maksimalkan PBB, Pemkot Gandeng PT Pos

■ Yulianingsih

Pembayaran PBB Kota Yogyakarta bisa dilakukan secara online di semua Kantor Pos.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya memaksimalkan perolehan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tahun ini, Pemkot menggandeng PT Pos Indonesia untuk memaksimalkan pembayaran PBB dari masyarakat. Kerja sama kedua pihak ditandatangani secara resmi, Rabu (27/8).

"Melalui kerja sama ini, pembayaran PBB Kota Yogyakarta bisa dilakukan secara online di semua Kantor Pos. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih mudah membayar PBB," kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPPDK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono.

Menurutnya, PT Pos memiliki jaringan kantor yang cukup luas. Di semua kecamatan sudah ada Kantor Pos. Dengan adanya kerja sama ini, dia berharap ketaatan masyarakat membayar PBB menjadi makin baik.

Mengenai target penerimaan PBB, Kadri menyebutkan tahun ini ditetapkan penerimaan sebesar Rp 46 miliar dengan total wajib pajak sebanyak 91 ribu orang. Dari target ini, realisasi penerimaan PBB baru sekitar 50 persen.

Namun Kadri memperkirakan, pada saat menjelang jatuh tempo pembayaran PBB 30 September 2014 mendatang, jumlahnya akan melonjak. "Biasanya, pada saat mendekati jatuh tempo realisasinya akan meningkat," ujarnya.

Selain mengejar WP untuk membayar PBB, pihaknya juga terus mengejar tunggakan PBB yang masih ada. Sejak mengelola PBB secara mandiri pada 2012 silam, tunggakan PBB di Kota Yogyakarta mencapai sekitar Rp 10 miliar. Selain itu juga masih terdapat tunggakan di KPP Pratama Rp 40 miliar.

Karena itu, pihaknya secara berkala terus mengejar WP yang masih menunggak. "Kami akan menyurati WP yang masih memiliki tunggakan," ujarnya.

Kepala Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Area VI Jateng-DIY Toblin, mengungkapkan kerja sama kantor pos dengan Pemkot Yogya bisa memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PBB. Masyarakat Yogya yang tidak berada di Kota Yogya, tetap bisa membayarkan PBB lewat Kantor Pos secara online.

"Meski sedang berada di luar daerah tetap bisa membayar PBB lewat kantor pos," katanya.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut akan dikenakan charge Rp 3.500. Setiap harinya, setelah masyarakat membayar kewajiban PBB akan langsung disetor ke kas negara. Menurut Toblin, layanan pembayaran PBB online via Kantor Pos ini ditargetkan bisa terlaksana mulai September mendatang.

"Saat ini kami masih menyempurnakan sistemnya. Segera setelah semuanya siap, maka akan kami *switch on* dan sistemnya jalan, karena saat ini *hardware* dan *software*-nya sudah siap," katanya.

■ ed : eko widiyatno

Ttd

ak Lanjut
Ditangkap
Diketahui
a Pers

DPPDK ✓ Positif ✓ Secara

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005